LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI WAMENA

Jl. Yos Sudarso No. 58 Wamena, Papua Pengunungan

(0969) 31208 - Fax (0969) 31134

pn.wamenapapua@gmail.com

www.pn-wamena.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Negeri Wamena ini dapat terselesaikan dengan baik.

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan), maka perlu dibuat laporan pelaksanaan kegiatan hasil kinerja bidang teknis dan non teknis pada Pengadilan Negeri Wamena Tahun Anggaran 2025. Dimana bidang teknis dilaksanakan oleh bagian Kepaniteraan dan bagian non teknis dilaksanakan oleh bagian kesekretariatan.

Hasil kerja ini disusun sesuai dengan ketentuan dan administrasi yang berlaku sekaligus merupakan hasil kinerja Pengadilan Negeri Wamena tahun 2025. Apabila masih ditemukan hambatan dalam penyelesaiannya, maka akan diperbaiki dalam proses evaluasi berlanjut sebagai upaya meningkatkan prestasi kerja dalam mencapai tujuan.

Wamena, 14 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Wamena

HIRMAWAN AGUNG WICAKSONO, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
BAB II	**KEADAAN PERKARA**	4
	A. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	4
	B. Penyelesaian Perkara.....	5
	- Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu.....	5
	- Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	5
	- Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	5
	- Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi.....	6
	- Perkara Anak yang berhasil dilakukan melalui Diversi.....	6
	- Perkara Perdata yang menggunakan e-Court	6
	- Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	6
	- Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara elektronik (e-Berpadu	6
	C. Program Prioritas Nasional	6
	- Posbakum.....	7
	- Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu	7
	- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	7
BAB III	**SUMBER DAYA MANUSIA**	
	KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/ PENDIDIKAN	8
	A. Mutasi	10
	B. Promosi	10
	C. Pensiun	10
	D. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang Mengikuti Diklat)	11
BAB IV	**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI**	15
	A. Pengelolaan Keuangan.....	15
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	15
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	18
BAB V	**PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**	20
	A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan.....	20
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	20
	C. Inovasi Pelayanan Publik.....	20
BAB VI	**PENGAWASAN**	21
	A. Internal.....	21

B. Evaluasi..... 21
BAB VII PENUTUP 22
A. Kesimpulan..... 22
B. Rekomendasi..... 22

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga segala tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hirarki tatanan norma yang berpuncak pada Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian pelaksanaan demokrasi juga harus berdasarkan hukum. Hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat sehingga harus dijamin adanya peran dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Sesuai ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Jo UU Nomor 35 tahun 1999 Jo UU Nomor 5 Tahun 2004, tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara.

Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa badan-badan peradilan di Indonesia baik secara Teknis Judisial maupun secara administratif, organisatoris dan finansial berada didalam satu lembaga yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sumber daya manusia yang ada dalam lembaga peradilan harus didukung oleh peningkatan kualitas dan kemampuan aparat atau sumber daya manusia yang bekerja didalamnya yaitu Hakim, Panitera dan seluruh jajaran pengawai Pengadilan diarahkan untuk lebih profesional, memiliki integritas, kepribadian dan moral yang tinggi, dengan tujuan dapat memiliki kemampuan yang tinggi, loyalitas dan disiplin serta mampu bekerja secara profesional sehingga mendapat kepercayaan dan penghormatan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dengan demikian Hakim, Panitera, Jurusita dan jajaran pegawai Pengadilan dapat menyelenggarakan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Setelah lembaga peradilan berada dalam satu atap dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah banyak perubahan besar yang terjadi terutama usaha peningkatan profesionalisme dari aparat pengadilan melalui peraturan-peraturan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia baik untuk Hakim, Panitera, Jurusita dan bagian administrasi seperti bagian kepegawaian dan organisasi tata laksana, umum dan keuangan serta perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.

Disamping pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas profesionalisme bagi seluruh aparatur Pengadilan, sarana dan prasarana yang ada cukup

memadai. Demikian pula anggaran yang dikeluarkan setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga anggaran yang ada saat ini sangat mendukung pelaksanaan tugas-tugas di Pengadilan. Kendala utamanya yaitu sumber daya manusia yang ada harus juga dipersiapkan agar program kerja yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan harapan pemerintah maupun masyarakat. Hal ini menjadi terkendala karena tidak semua Pengadilan Negeri di Indonesia siap dengan sumber daya manusia baik dari personilnya maupun kualitasnya.

Salah satu kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Wamena yakni adanya beberapa jabatan yang telah terisi namun tidak ditempati oleh orang yang tepat, dikarenakan dari segi kepangkatan belum memadai atau dari segi keterampilan belum atau tidak mampu menerima tanggung jawab terhadap jabatan-jabatan tersebut. Keadaan ini sudah sering dilaporkan setiap Rakerda yang diadakan Mahkamah Agung di Pengadilan Tingkat Banding. Namun demikian tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang meliputi Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanni Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Mamberamo Tengah.

B. Visi dan Misi

Pengadilan Negeri Wamena yang merupakan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan di lingkungan peradilan umum. Sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya. Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas pokok dan fungsi tersebut diperlukan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Wamena yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Visi Pengadilan Negeri Wamena mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI WAMENA YANG AGUNG"

Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Wamena yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Wamena;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Wamena;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Wamena.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tantang Organisasi dan Tata Laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Wamena menurut keadaan bulan Desember tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

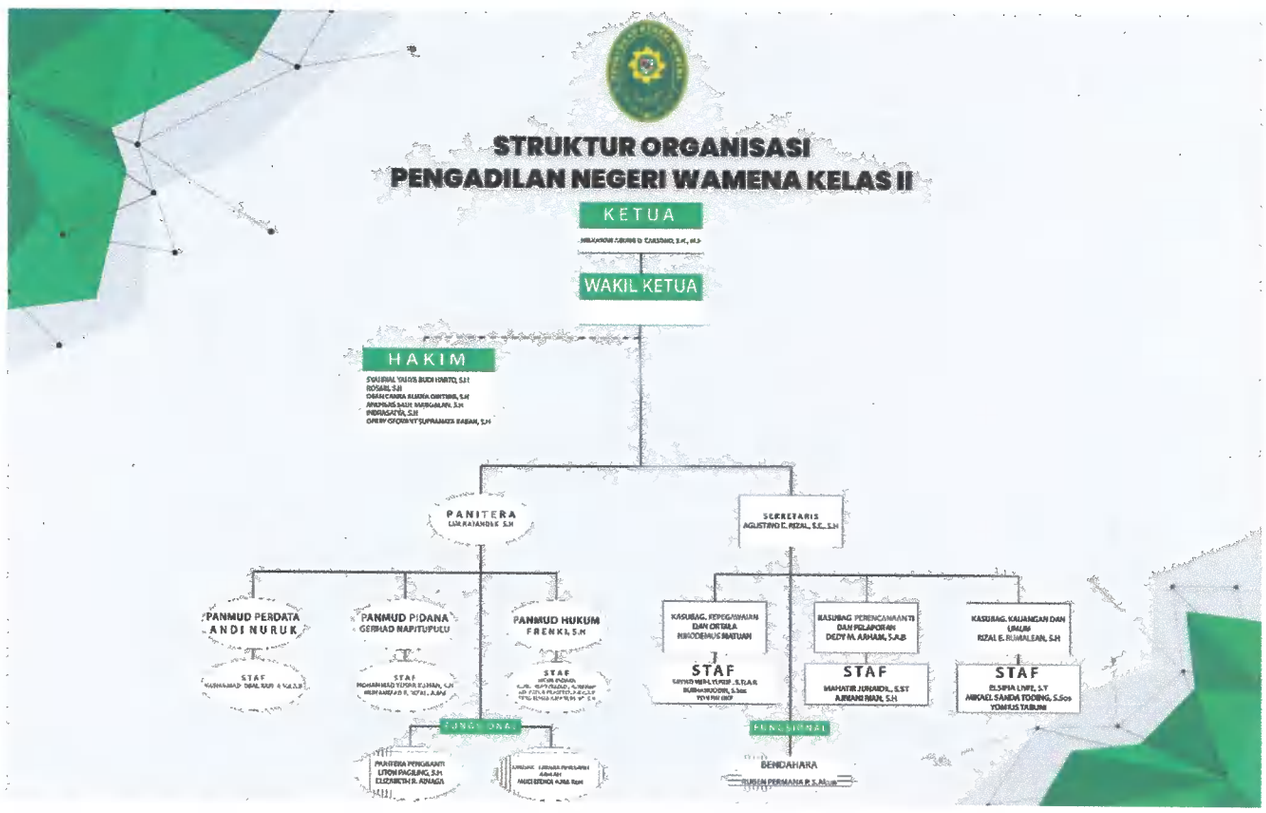

BAB II
KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara tahun 2025 pada Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena adalah sebagai berikut :

Tabel keadaan perkara tahun 2025

Perkara	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2025
Pidana	116
Perdata	102

Rincian perkara pidana tahun 2025 menurut klasifikasi perkara pada Pengadilan Negeri Wamena dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel perkara pidana berdasarkan klasifikasi perkara tahun 2025

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara Masuk
1	Kejahatan perjudian	3
2	Kejahatan terhadap kemerdekaan Orang	0
3	Kejahatan terhadap kesusilaan	0
4	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	2
5	Kejahatan terhadap nyawa	18
6	Kejahatan yang membahayakan keamananan umum bagi orang atau barang	13
7	Narkotika	19
8	Pelanggaran Kesusilaan	0
9	Pencurian	32
10	Penganiayaan	6
11	Penggelapan	4
12	Penipuan	0
13	Perbuatan Curang	0
14	Perlinduangan anak	5
15	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	0
16	Tindak pidana senjata api atau benda tajam	9
17	Lain-lain	5

Total	116

Rincian perkara perdata tahun 2025 menurut klasifikasi perkara pada Pengadilan Negeri Wamena dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel perkara perdata berdasarkan klasifikasi perkara tahun 2025

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Masuk
1	Perceraian	9
2	Perbuatan Melawan Hukum	5
3	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	0
4	Permohonan Pengangkatan Anak	0
5	Pengangkatan Wali Bagi Anak	10
6	Permohonan Ganti Nama	8
7	Wanprestasi	6
8	Lain-lain	64
Total		**102**

B. Penyelesaian Perkara

- **Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu**

Tabel perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Wamena adalah sebagai berikut.

No	Jenis Perkara	Jumlah Putusan Perkara	Jumlah Perkara yang Putus Tepat Waktu (Kurang dari 5 Bulan)	Jumlah Perkara yang Putus Tidak Tepat Waktu (Lebih dari 5 Bulan)
1	Pidana (Biasa)	94	94	0
2	Pidana Cepat	0	0	0
2	Pidana Anak	6	6	0
3	Perdata	99	99	0

- **Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**

Tabel perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) :

Perkara	Upaya Hukum		
	Banding	Kasasi	PK
Pidana	102	12	0
Perdata	99	0	0

- **Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif**

Tabel perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Wamena.

Jumlah Perkara melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	Jumlah Perkara yang Berhasil melalui Pendekatan Keadilan Restoratif
2	2

- **Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi**

Tabel perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Wamena.

Jumlah Perkara yang Mediasi	Jumlah Perkara yang Berhasil dengan Mediasi
12	1

- **Perkara Anak yang berhasil dilakukan melalui Diversi**

Tabel perkara anak yang berhasil dilakukan melalui diversi pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Wamena.

Jumlah Perkara Anak Tahun 2025	Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi
6	4

- **Perkara Perdata yang menggunakan e-Court**

Tabel perkara Perdata yang menggunakan e-court pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Wamena.

Jumlah Perkara Perdata Tahun 2025	Jumlah Perkara Perdata melalui e-court
102	102

- **Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)**

Tabel perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Wamena.

Jumlah Perkara Pidana Tahun 2025	Jumlah Perkara Pidana melalui e-Berpadu
116	98

- **Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara elektronik (e-Berpadu**

Tabel Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Wamena.

Layanan Perkara Pidana	Jumlah Layanan Perkara Pidana melalui e-Berpadu
Penahanan	204
Penyitaan	266
Penggeledahan	54

C. Program Prioritas Nasional

Saat ini Pengadilan Negeri Wamena sedang berbenah dan mempersiapkan diri untuk mendapatkan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).

- **Posbakum (Pos Bantuan Hukum)**

  Posbakum adalah layanan yang dibentuk dan ada pada setiap Satuan Kerja Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Melalui Posbakum masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses perkara. Sepanjang tahun anggaran 2025 ini, dari jumlah anggaran Rp 24.000.000,- yang diterima, telah terserap keseluruhan sejumlah Rp 24.000.000,-

- **Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu**

  Sidang keliling bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum yang inovatif dan berkeadilan kepada para pencari keadilan. Pengadilan tingkat pertama memiliki kegiatan sidang keliling/pelayanan terpadu, kegiatan sidang/penyelesaian perkara di luar gedung Pengadilan ini bertujuan agar masyarakat pencari keadilan dapat beracara dengan biaya ringan (murah). Namun di tahun 2025 Pengadilan Negeri Wamena tidak atau belum mendapatkan alokasi anggaran untuk program sidang keliling ini.

- **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

  Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang bantuan hukum, diterangkan bahwa Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai oleh negara melalui DIPA Pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis. Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Wamena tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk perkara prodeo.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu lembaga atau organisasi, sebaik dan secanggih apapun perangkat teknologi jika tidak diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelolanya maka sasaran dan tujuan organisasi akan sulit tercapai. Oleh karenanya, untuk dapat meraih target atau tujuan organisasi mesti dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai nilai unggul berupa integritas, kapasitas dan etos kerja yang baik sehingga menghasilkan output dan outcome berkualitas. Untuk mendukung kinerja organisasi, Pengadilan Negeri Wamena senantiasa melakukan pembinaan kepada setiap aparatur peradilan baik teknis maupun non teknis dengan cara mengikutsertakan dalam setiap pelatihan yang diselenggarakan secara daring maupun luring. Adapun keadaan dan komposisi sumber daya manusia Pengadilan Negeri Wamena adalah sebagai berikut.

Tabel Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan pada Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2025

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Pendidikan
1	Hirmawan Agung Wicaksono, S.H.,M.H.	Pembina Tingkat I IV/b	S-2
2	Andreas Saut Mangalan, S.H.	Penata Muda III/a	S-1
3	Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H.	Penata Muda III/a	S-2
4	Rosari, S.H.	Penata Muda III/a	S-1
5	Dean Cakra Buana Ginting, S.H.	Penata Muda III/a	S-2
6	Syahrial Yahya Budi Harto, S.H.	Penata Muda III/a	S-1
7	Indrasatya, S.H.	Penata Muda III/a	S-1
8	Agustino Edward Rizal, S.E., S.H.	Penata Tingkat I III/d	S-1
9	Lim Katandek, S.H.	Penata Tingkat I III/d	S-1
10	Nikodemus Matuan	Penata III/c	SLTA/SEDERAJAT
11	Frengki, S .H.	Penata III/c	S-1
12	Rizal Setiawan Rumalean, S.H.	Penata III/c	S-1

13	Andi Nuruk	Penata Muda Tingkat I III/b	SLTA/SEDERAJAT
14	Gerhad Napitupulu	Penata Muda Tingkat I III/b	SLTA/SEDERAJAT
15	Dedy Muh. Arham, A.Md.Kom., S.A.B.	Penata Muda Tingkat I III/b	S-1
16	Liton Pagiling, S.H.	Penata III/c	S-1
17	Elisabeth Ritha Ainaga	Penata Muda Tingkat I III/b	SLTA/SEDERAJAT
18	Ruben Permana Putra, S. Akun.	Penata Muda Tingkat I III/b	S-1
19	Sayyid Muh. Yusuf, S.Tr.A.B.	Penata Muda III/a	D-IV
20	Mahatir Junaidil, S.ST.	Penata Muda III/a	D-IV
21	Mohammad Yusra Kuman, S.H.	Penata Muda III/a	S-1
22	Elsifia Liwe, S.T.	Penata Muda III/a	S-1
23	Simon Dimara	Pengatur II/c	SLTA/SEDERAJAT
24	Muhammad Fachri Rizal, A.Md.	Pengatur II/c	D-III
25	Muhammad Ihsan Muzadi, A.Md.Kom.	Pengatur II/c	D-III
26	Muhamad Iqbal Rafi, A.Md.A.B.	Pengatur II/c	D-III
27	Adi Catur Prasetio, A.Md.A.P.	Pengatur II/c	D-III
28	Erna Elviana Manurung, S.H.	IX	S-1
29	Ajriani Rian, S.H.	IX	S-1
30	Mikael Sanda Toding, S.Sos.	IX	S-1
31	Burhanuddin, S.Sos.	IX	S-1
32	Yon Paluke	V	SLTA/SEDERAJAT
33	Yomius Tabuni	V	SLTA/SEDERAJAT
34	Fauzi Efendi, A.Md.Kom.	Pengatur Tingkat I II/d	D-III

35	Arafah	Pengatur Tingkat I II/d	SLTA/SEDERAJAT

A. Mutasi

Mutasi atau alih tempat/tugas dilaksanakan untuk kepentingan dinas maupun pertimbangan lainnya, mutasi dalam arti peralihan tugas dilaksanakan untuk memberikan pengalaman regional maupun nasional. Adapun pada tahun 2025 terdapat mutasi keluar dari Pengadilan Negeri Wamena ke Satuan Kerja lain.

No	Nama	Satker/Jabatan Lama	Satker/Jabatan Baru
1.	Feisal Maulana, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Wamena	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2.	Saifullah Anwar, S.H.,M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Wamena	Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba
3.	Roy Eka Perkasa, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Wamena	Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba
4.	Junaedi Azis, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Wamena	Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor

Dan pada tahun 2025 juga terdapat Hakim/ Pegawai yang mutasi masuk pada Pengadilan Negeri Wamena.

B. Promosi

Selama tahun 2025, terdapat pelantikan jabatan baru pada Pengadilan Negeri Wamena.

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Andreas Saut Mangalan, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang	Hakim Pengadilan Negeri Wamena
2.	Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Blitar	Hakim Pengadilan Negeri Wamena
3.	Rosari, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Palu	Hakim Pengadilan Negeri Wamena
4.	Dean Cakra Buana Ginting, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo	Hakim Pengadilan Negeri Wamena
5.	Syahrial Yahya Budi Harto, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jombang	Hakim Pengadilan Negeri Wamena
6.	Indrasatya, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso	Hakim Pengadilan Negeri Wamena

C. Pensiun

Tidak terdapat pegawai pada Pengadilan Negeri Wamena yang pensiun pada tahun 2025.

D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Dalam rangka upaya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia baik teknis maupun non teknis, Pengadilan Negeri Wamena senantiasa mendorong setiap aparatur untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jayapura maupun lembaga lain yang terkait. Adapun pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti selama tahun 2025, yaitu sebagaimana terlampir dalam tabel berikut.

No.	Nama	Jabatan	Tanggal/Tempat	Kegiatan/Pelatihan dan Penyelenggara
1.	Hirmawan Agung Wicaksono, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Wamena	28 Agustus 2025. Dilaksanakan secraa E-learning	Peningkatan Pemahaman Gratifikasi bagi Penyelenggara Negara/ Pegawai Negeri. Diselenggarakan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2.	Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Wamena	21-26 Agustus 2025. Dilaksanakan secara Online (Daring).	Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Diselenggarakan Oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
			25 September-2 Oktober 2025. Dilaksanakan secara Blended Learning	Bimbingan Teknis Hakim Mediator. Diselenggarakan Oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
			30 Oktober-5 November 2025. Dilaksanakan Secara Online	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023). Diselenggarakan Oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA-RI.
			17-21 November 2025. Dilaksanakan Secara Online	Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum untuk Keadilan Lingkungan bagi Peradilan Umum seluruh Indonesia. Diselenggarakan Oleh Badan Strategi Kebijakan dan

				Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA-RI.
3.	Andreas Saut Mangalan, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Wamena	21-26 Agustus 2025. Dilaksanakan secara Online (Daring).	Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Diselenggarakan Oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
			2 September-27 September 2025. Dilaksanakan Secara Online.	Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum dan Aparat Penegak Hukum Seluruh Indonesia. Diselenggarakan Oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA-RI.
			25 September-2 Oktober 2025. Dilaksanakan secara Blended Learning	Bimbingan Teknis Hakim Mediator. Diselenggarakan Oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
			30 Oktober-5 November 2025. Dilaksanakan di Pusdliklat Mahkamah Agung RI.	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023). Diselenggarakan Oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA-RI.
4	Agustino Edward Rizal, S.E., S.H.	Sekretaris	6 Maret 2025.	Pelatihan Data Analyst Fundamental Manajemen Manajerial. Diselenggarakan Oleh Esas Management.
			21 Juli-30 Oktober 2025. Dilaksanakan secara Online (MOOC).	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level-1. Diselenggarakan Oleh Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa.

			11 September 2025. Dilaksanakan secara E-learning.	Peningkatan Pemahaman Gratifikasi.
5	Dedy Muh. Arham, A.Md.Kom., S.A.B.	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	6-9 Oktober 2025. Dilaksanakan di Jogja.	Pelatihan Database Administrator PostgreSQL. Diselenggarakan Oleh Nuansa Global.
6	Ruben Permana Putra, S. Akun.	Pranata Keuangan APBN Mahir, Staf Subbag.Umum dan Keuangan	21 Juli-30 Oktober 2025. Dilaksanakan secara Online (MOOC).	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level-1. Diselenggarakan Oleh Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa.
7	Mahatir Junaidil, S.ST.	Staf-Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	21 Juli-30 Oktober 2025. Dilaksanakan secara Online (MOOC). 6-9 Oktober 2025. Dilaksanakan di Jogja.	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level-1. Diselenggarakan Oleh Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa. Pelatihan Database Administrator PostgreSQL. Diselenggarakan Oleh Nuansa Global.
8	Sayyid Muh. Yusuf, S.Tr.A.B.	Staf-Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	21 Juli-30 Oktober 2025. Dilaksanakan secara Online (MOOC).	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level-1. Diselenggarakan Oleh Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa.
9	Mikael Sanda Toding, S.Sos.	Staf-Subbagian Umum dan Keuangan	12-13 Juni 2025. Dilaksanakan di Surabaya.	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa (BPJP) Level-1. Diselenggarakan Oleh LKPN.
10	Elsifia Liwe, S.T.	CPNS-Teknisi Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Wamena	30 Agustus-25 November 2025. Dilaksanakan via Zoom.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025. Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
11	Muhammad Fachri Rizal, A.Md.	CPNS-Dokumentalis Hukum	30 September-22 Desember 2025.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun

		Pengadilan Negeri Wamena	Dilaksanakan via Zoom.	2025. Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
12	Muhammad Ihsan Muzadi, A.Md.A.B.	CPNS-Dokumentalis Hukum Pengadilan Negeri Wamena	30 September-22 Desember 2025. Dilaksanakan via Zoom.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025. Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
13	Muhamad Iqbal Rafi, A.Md.A.B.	CPNS-Dokumentalis Hukum Pengadilan Negeri Wamena	30 September-22 Desember 2025. Dilaksanakan via Zoom.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025. Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
14	Adi Catur Prasetio, A.Md.A.P.	CPNS-Dokumentalis Hukum Pengadilan Negeri Wamena	30 September-22 Desember 2025. Dilaksanakan via Zoom.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025. Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Negeri Wamena Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	SATKER
Pembinaan Administasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	9.717.368.000	9.521.881.827	195.486.173	400044

Tabel Rekapitulasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	SATKER
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	393.635.000	393.635.000	0	400044

Tabel Rekapitulasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	SATKER
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	52.000.000	52.000.000	0	400045

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Gedung Kantor

Kantor Pengadilan Negeri Wamena yang terletak di Jln. Yos Sudarso No. 58 Wamena adalah gedung yang dibangun pada Tahun 1983 diatas Tanah bersertifikat Hak Pakai seluas 5.800 m^2 dengan konstruksi semi permanen (non standart). Saat ini, dengan diseragamkannya prototype gedung Pengadilan di seluruh Indonesia, maka Pengadilan Negeri Wamena menempati gedung baru sejak tahun 2013.

Pengadilan Negeri Wamena dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya didukung dengan sarana dan prasarana fasilitas gedung sebagai berikut :

- Inventaris

Berupa meja dan kursi yang untuk sementara masih belum cukup memadai dengan jumlah pegawai yang ada.

- **Pengelolaan Data**

Infrastruktur pengelolaan data berupa komputer PC/desktop sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit dan sebanyak 18 unit laptop (notebook) yang diperuntukkan pada tiap-tiap sub bagian, serta masing-masing ruang di Kepaniteraan, ruang Panitera, ruang Sekretaris dan ruang Juru Sita.

- **Mesin**

Infrastruktur mesin berupa mesin babat (pemotong) rumput sebanyak 2 (dua) unit dan Generator (Genset) juga sebanyak 1 (satu) unit.

2. Rumah Dinas

Sesuai dengan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung dalam pemutasian Hakim selama bertugas dan menempati rumah dinas, dirasa sangat tidak mungkin untuk membeli alat-alat perabotan rumah yang harganya sangat mahal di Wamena sehingga idealnya pada rumah-rumah dinas jabatan telah disiapkan perabotan rumah tangga sebagai barang inventaris rumah dinas jabatan, sehingga memberikan rasa betah dan nyaman kepada yang menempati dalam menjalankan tugas di Pengadilan Negeri Wamena.

Pengadilan Negeri Wamena mempunyai beberapa rumah dinas sebagai berikut :

- ❖ Rumah Jabatan Ketua : 1 Unit;
- ❖ Rumah Jabatan Wakil Ketua : 1 Unit;
- ❖ Rumah Jabatan Hakim : 4 Unit;
- ❖ Rumah Jabatan Panitera / Sekretaris : 1 Unit;
- ❖ Rumah Pegawai : 1 Unit Kopel (terdiri dari 5 pintu).

Dari jumlah rumah yang tersedia masih dirasa kurang, sehingga pegawai yang tidak mendapatkan rumah dinas harus menyewa rumah atau menumpang tinggal dirumah keluarga. Kondisi inilah yang membuat tidak adanya kenyamanan, ditambah lagi biaya hidup yang sangat mahal di Kabupaten Jayawijaya - Wamena apabila pegawai harus menyewa rumah.

- **Kondisi Rumah Dinas**

No	Uraian	Jumlah Unit	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	V			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1			V	1 rumah dalam kondisi rusak ringan
3	Rumah Dinas Hakim	4	V	V		2 rumah dalam kondisi rusak ringan
4	Rumah Dinas Panitera	1		V		1 rumah dalam kondisi rusak ringan

5	Rumah Dinas Pegawai	1	V			Kopel (terdiri dari 5 pintu)

3. Sarana Transportasi

Sarana transportasi berupa kendaraaan roda 4 sebanyak 3 (tiga) unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 9 (Sembilan) unit.

Dari jumlah kendaraan dinas yang sudah ada masih diharapkan adanya penambahan kendaraan sebagai berikut :

- ❖ Kendaraan roda 4 sebanyak 1 (satu) unit untuk kendaraan dinas jabatan Ketua;
- ❖ Kendaraan roda 4 sebanyak 1 (satu) unit untuk kendaraan dinas jabatan Wakil Ketua;
- ❖ Kendaraan roda 4 sebanyak 1 (satu) unit untuk kendaraan operasional kantor;
- ❖ Kendaraan roda 2 sebanyak 9 (sembilan) unit untuk kendaraan dinas operasional pada masing-masing bagian urusan teknis maupun administrasi.

❖ Kondisi Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I.	**Jenis kendaraan roda 4**					
1	Toyota Innova	2007		V		
2	Toyota Veloz	2025	V			
3	Toyota Kijang Super	1994		V		
II.	**Jenis kendaraan roda 2**					
1	Motor Bebek Supra X125	2005			V	
2	Motor Bebek Supra X125	2005			V	
3	Motor Bebek Supra Fit	2005			V	
4	Motor Yamaha L2	1995			V	
5	Motor Bebek Honda Revo	2007			V	
6	Motor Bebek Honda Revo	2007			V	
7	Motor Bebek Supra Fit X	2008		V		
8	Motor Bebek Supra Fit X	2008			V	
9	Motor Bebek Supra Fit X	2008			V	

Matriks Sarana/Prasarana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wamena

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	

4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang	4	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang Kesekretariatan	1	
	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
9	Komputer PC	47	
10	Laptop	18	
11	Server	2	
12	Router	3	
13	Modem	1	
14	Printer	8	
15	Scanner	4	
16	Infocus	1	
17	Mesin Fotocopy	-	
18	Televisi LED	2	
19	Faximile	1	
20	Genset	1	
21	Meja Kerja 1/2 Biro	25	
22	Meja Kerja 1 Biro	15	
23	Kursi Putar Pimpinan	4	
24	Kursi Putar Staf	25	
25	Kursi Tamu set	5	
26	Lemari Rak Buku 2 Pintu	8	
27	Rak Arsip	6	
28	Meja Pelayanan	1	
29	Brankas	2	
30	Mesin Babat Rumput	2	

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

❖ Implementasi e-court di Pengadilan Negeri Wamena

Sejak tahun 2021 hingga sekarang, Pengadilan Negeri Wamena telah menerapkan dan mengimplementasikan pendaftaran perkara perdata gugatan, gugatan sederhana dan permohonan melalui aplikasi e-court.

❖ Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Wamena

Saat ini Pengadilan Negeri Wamena telah menggunakan jaringan provider (ISP) yang terhubung/terkoneksi dengan satelit Starlink untuk melakukan sinkronisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan mendukung kegiatan yang memerlukan akses internet lainnya. Namun demikian, dengan kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk

menyambung fiber optik 100% sehingga dalam pelaksanaannya masih memerlukan support/bantuan dengan menggunakan perangkat satelit.

- Implementasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri Wamena

  Sejak tahun 2022, Pengadilan Negeri Wamena juga telah mengimplementasikan aplikasi E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) sebagai upaya mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Saat ini Pengadilan Negeri Wamena telah memperoleh nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan dengan nilai "93,46%" dan akan terus berupaya meningkatkan kinerja untuk meraih peringkat dan predikat yang lebih baik.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Sejak tahun 2018, Pengadilan Negeri Wamena telah mengaplikasikan standar pelayanan dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan untuk mendukung kelancaran dalam proses pelayanan baik eksternal maupun internal maka sejak tahun 2015 hingga kini Pengadilan Negeri Wamena telah menggunakan dan mengimplementasikan aplikasi PTSP+ dan Pada tahun 2025 menggunakan Aplikasi SIMETRI dalam pengelolaan persuratan dan pembuatan surat keterangan serta penyitaan.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Sejak tahun 2021 hingga sekarang Pengadilan Negeri Wamena mengimplementasikan aplikasi LAPAGO (Layanan Pengadilan Go Mobile) yang merupakan program aplikasi virtual assistant untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Layanan ini dapat diakses melalui percakapan Whatsapp dan akan mendapatkan jawaban secara otomatis (chat bot) sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh pengirim pesan.

BAB VI
PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam lingkungan Pengadilan sendiri dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan dibidang perkara, Ketua Pengadilan Negeri Wamena telah menunjuk :

- Hakim pengawas bidang sesuai dengan struktur organisasi
- Pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua
- Hakim sebagai humas kantor Pengadilan Negeri Wamena, yang bertugas sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

Berdasarkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua maka fungsi pengawasan internal dipimpin oleh Wakil Ketua.

B. EVALUASI

Evaluasi dilakukan melalui rapat pimpinan bertempat di ruang pertemuan Ketua Pengadilan dan rapat bulanan bertempat di Ruang Sidang Utama kantor Pengadilan Negeri Wamena. Selain itu juga dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung dengan memeriksa pejabat terkait baik kepaniteraan maupun kesekretariatan melalui metode interview serta pemeriksaan dokumen.

BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berikut sebagai kesimpulan atas laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Wamena tahun 2025 :

1. Semua tugas-tugas dan tanggung jawab pada Pengadilan Negeri Wamena dapat dilaksanakan dengan baik meskipun sering terlambat. Hal ini disebabkan karena kendala internal yakni keterbatasan sumber daya manusia serta kedisiplinan yang kurang dari setiap pegawai yang ada dan kendala eksternal yaitu jaringan internet di Kabupaten Jayawijaya yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas administrasi di Pengadilan.
2. Bahwa kondisi geografis yang sulit dan kondisi sosial ekonomi serta indeks biaya hidup yang sangat tinggi dibanding daerah-daerah lainnya, khususnya di Papua, namun Pengadilan Negeri Wamena dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena hal-hal diatas tidak menjadi alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban, tetapi menjadi bahan pertimbangan dan perhatian yang sungguh-sungguh kepada pimpinan tertinggi yaitu Pengadilan Tinggi Jayapura dan Mahkamah Agung Republlik Indonesia.

B. REKOMENDASI

1. Prioritas jangka pendek yaitu perlunya penambahan pegawai dari semua jenjang pendidikan mulai SMA sampai dengan S3, khususnya tenaga terampil di bidang komputer.
2. Pengadaan sarana rumah dinas untuk para pegawai pada Pengadilan Negeri Wamena.
3. Pimpinan Pusat dapat mempertimbangkan lagi struktur organisasi di pengadilan tingkat pertama agar tidak tumpang tindih dengan pengadilan ditingkat banding, contohnya: sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan yang tumpang tindih dengan bagian umum dan keuangan. Karena dalam kenyataannya bagian umum dan keuangan masuk diwilayah pekerjaan perencanaan anggaran.